

**ANALISIS PENGARUH PRAKTIK *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE* DAN
MANAJEMEN LABA TERHADAP *CORPORATE
ENVIRONMENTAL DISCLOSURE***
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI dan PROPER
Tahun 2008-2010)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

BENNY SETYAWAN
NIM. C2C008027

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Benny Setyawan
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008027
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PRAKTIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DAN MANAJEMEN LABA
TERHADAP *CORPORATE*
ENVIRONMENTAL DISCLOSURE
(Studi Empiris pada Perusahaan yang
Terdaftar di BEI dan PROPER
Tahun 2008-2010)**

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.

Semarang, 5 Juni 2012

Dosen Pembimbing,

(Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt.)

NIP. 19580525 199103 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Benny Setyawan
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008027
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PRAKTIK
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DAN MANAJEMEN LABA
TERHADAP CORPORATE
ENVIRONMENTAL DISCLOSURE
(Studi Empiris pada Perusahaan yang
Terdaftar di BEI dan PROPER
Tahun 2008-2010)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 14 Juni 2012

Tim penguji

1. Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. (.....)
2. Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Benny Setyawan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: *ANALISIS PENGARUH PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP CORPORATE ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI dan PROPER Tahun 2008-2010), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 5 Juni 2012

Yang membuat pernyataan,

(Benny Setyawan)
NIM. C2C008027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa yang meringankan derita seorang mu'min di dunia, maka Allah akan meringankan satu derita hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akherat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia akherat. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkannya masuk ke dalam surga...” (HR. Imam Muslim)

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (Q.S: Al- Insyiroh 6-8)

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku,
untuk adik-adikku,
untuk keluarga besarku,
untuk guru dan teman-temanku,
Terima kasih atas semua doa, dukungan, motivasi dan kasih
sayang yang telah diberikan.*

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the influence of good corporate governance practices and earnings management towards corporate environmental disclosure (CED). Good corporate governance practices are measured by the proportion of independent board, the number of board meetings and the size of audit committee. Profitability and leverage used as control variables. Earnings management is measured by the modified discretionary accrual Jones model.

The population of this study is non-financial companies listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2008-2010. The total sample was 19 non-financial public companies listed on IDX and PROPER 2008-2010. The year of observation period is 2008-2010. So the total observation is 57. Sampling technique used in this study is purposive sampling method. Data analysis technique was performed by the hypothesis testing using multiple regression method.

The results of this study indicate that the number of board meetings significantly influence towards corporate environmental disclosure. Meanwhile, the proportion of independent board, the size of audit committee, earnings management, profitability and leverage did not significantly influence towards corporate environmental disclosure.

Keywords: *Good Corporate Governance Practices, Earnings Management, Corporate Environmental Disclosure.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik *good corporate governance* dan manajemen laba terhadap *corporate environmental disclosure*. Praktik *good corporate governance* diproksikan oleh proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit. Penelitian ini juga menyertakan profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan *discretionary accrual* model Jones yang dimodifikasi.

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2010. Total sampel penelitian adalah 19 perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di BEI dan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) 2008-2010. Periode pengamatan adalah tahun 2008-2010. Jadi total pengamatan adalah 57. Teknik *sampling* menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *corporate environmental disclosure*. Sementara itu, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, manajemen laba, profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *corporate environmental disclosure*.

Kata kunci: Praktik *Good Corporate Governance*, Manajemen Laba, *Corporate Environmental Disclosure*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP *CORPORATE ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI dan PROPER Tahun 2008-2010)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan dan doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Ph.D., M.Si., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, kritik, nasehat, dukungan dan motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Ibu Dr. Etna Nur Afri Yuyetta, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Wali.

5. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu dan Bapak terima kasih untuk semua doa, cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan dan motivasi baik moril maupun materiil yang tak pernah putus. Insya Allah suatu saat nanti penulis akan membuat kalian bangga.
7. Kedua Adikku tersayang, Risa Alfiana dan Bagus Satriyo yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
8. Kedua Nenekku: Mbah Mah dan Mbah Munasih, De Kinto, Mbak Indo dan Mbak Darti yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis.
9. Semua teman-teman Akuntansi angkatan 2008 Undip. AKUNTANSI JAYA!!
10. Teman-teman KKN Ds. Tahunan 2011, Ikhwan, Yudi, Adrika, Goju, Anin, Yudia, Anisa dan Kartika. Terima kasih atas kebersamaannya di Jepara.
11. Keluarga Kos Songgo Langit: Pakdhe Sarno, Mas Angling, Mas Bambang, Mas Bastian, Mas Nizar, Mas Henry, Mas Ali dan Doni; Kos @OEMAHkita: Andi, Antok dan Tegar, terima kasih untuk kebersamaannya.
12. Seseorang yang selalu mendoakan dan membantu penulis dalam setiap untaian doanya, kapanpun dan dimanapun. Mungkin kita sudah bertemu atau mungkin masih menjadi rahasia-Nya. Semoga kita dapat dipertemukan karena ridhoNya. Amin.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun kiranya dapat menjadi satu sumbangan yang berarti dan penulis harapkan adanya saran dan kritik untuk perbaikan di masa mendatang.

Semarang, 5 Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 11 |
| 2.1.1 Teori Agensi | 11 |
| 2.1.2 Teori Sinyal | 13 |
| 2.1.3 Teori <i>Stakeholder</i> | 15 |
| 2.1.4 Teori Legitimasi | 17 |
| 2.1.5 <i>Corporate Social Responsibility</i> | 19 |
| 2.1.6 <i>Corporate Environmental Disclosure</i> | 20 |
| 2.1.7 Manajemen Laba | 23 |
| 2.1.8 Praktik <i>Good Corporate Governance</i> | 25 |
| 2.1.8.1 Dewan Komisaris | 27 |

| | |
|---|----|
| 2.1.8.2 Komite Audit | 31 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 33 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran | 37 |
| 2.4 Pengembangan Hipotesis | 38 |
| 2.4.1 Pengaruh Praktik Good Corporate Governace terhadap <i>Corporate Environmental Disclosure</i> | 38 |
| 2.4.1.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen..... | 39 |
| 2.4.1.2 Jumlah Rapat Dewan Komisaris | 40 |
| 2.4.1.3 Ukuran Komite Audit..... | 42 |
| 2.4.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap <i>Corporate Environmental Disclosure</i> | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 44 |
| 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional | 44 |
| 3.1.1 Variabel Terikat (dependen) | 45 |
| 3.1.2 Variabel bebas (independen) | 46 |
| 3.1.2.1 Praktik <i>Good Corporate Governance</i> | 46 |
| 3.1.2.2 Manajemen Laba | 47 |
| 3.1.3 Variabel Kontrol..... | 49 |
| 3.1.3.1 Profitabilitas | 49 |
| 3.1.3.2 <i>Leverage</i> | 50 |
| 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian..... | 50 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 51 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 51 |
| 3.5 Metode Analisis Data | 52 |
| 3.5.1 Statistik Deskriptif | 52 |
| 3.5.2 Uji Asumsi Klasik..... | 52 |
| 3.5.2.1 Uji Normalitas | 52 |
| 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas | 53 |
| 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas | 54 |
| 3.5.2.4 Uji Autokorelasi | 55 |
| 3.5.3 Pengujian Hipotesis | 55 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 3.5.3.1 Koefisien Determinasi | 56 |
| 3.5.3.2 Uji Statistik F | 56 |
| 3.5.3.3 Uji Statistik t | 57 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 58 |
| 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian..... | 58 |
| 4.2 Analis Data..... | 60 |
| 4.2.1 Statistik Deskriptif | 60 |
| 4.3 Uji Asumsi Klasik | 63 |
| 4.3.1 Uji Normalitas..... | 63 |
| 4.3.2 Uji Multikolinieritas..... | 65 |
| 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas..... | 66 |
| 4.3.4 Uji Autokorelasi | 68 |
| 4.4 Analisis Regresi Berganda | 69 |
| 4.5 Uji Hipotesis | 70 |
| 4.5.1 Uji Statistik t..... | 70 |
| 4.5.2 Uji Statistik F..... | 72 |
| 4.5.3 Koefisien Determinasi | 73 |
| 4.6 Intrepetasi Hasil..... | 74 |
| BAB V PENUTUP..... | 81 |
| 5.1 Kesimpulan | 81 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian | 82 |
| 5.3 Saran..... | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 88 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Kriteria Peringkat PROPER..... | 23 |
| Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu | 35 |
| Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel..... | 44 |
| Tabel 4.1 Ringkasan Penentuan Sampel Penelitian | 58 |
| Tabel 4.2 Kriteria Perusahaan Sampel | 59 |
| Tabel 4.3 Stastistik Deskriptif..... | 61 |
| Tabel 4.4 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov..... | 65 |
| Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas | 66 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas-Uji Glejser | 68 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi-DW <i>Test</i> | 69 |
| Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Berganda..... | 70 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji Pengaruh Simultan (<i>F-test</i>)..... | 73 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi | 73 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1 Struktur <i>Board of Director</i> (BoD) dalam <i>One Tier System</i> | 28 |
| Gambar 2.2 Struktur BoD dan BoC dalam <i>Two Tiers System</i> yang berkembang di Indonesia | 30 |
| Gambar 2.3 Model Kerangka Pemikiran Penelitian | 38 |
| Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas: Grafik Histogram | 64 |
| Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas: Grafik <i>Normal P-P Plot</i> | 64 |
| Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas: Grafik Scatterplot..... | 67 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Daftar Perusahaan Sampel

Lampiran B : Indikator *Corporate Environmental Disclosure* menurut GRI

Lampiran C : Tabulasi Data Mentah

Lampiran D : Hasil Penghitungan *Discretionary Accrual*

Lampiran E : Hasil Output SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perhatian sosial cenderung diakui sebagai suatu respon perusahaan yang signifikan untuk berkomunikasi antara perusahaan dan masyarakat berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan (Sun *et al.* 2010). Perusahaan disini dituntut tidak hanya sebatas memikirkan bagaimana untuk mendapatkan laba/*profit* saja, tetapi dituntut juga untuk memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan atas kegiatan usahanya.

Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkan perusahaan saat ini adalah informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews, 1985 dikutip dari Sembiring, 2005).

Menurut Gray *et al.* (1987, dalam Sembiring, 2005), tumbuhnya kesadaran publik akan peran perusahaan di tengah masyarakat melahirkan kritik karena menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat *safety* produk, serta hak dan status tenaga kerja. Tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak dari aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat. Perusahaan dihimbau untuk bertanggung jawab

tidak hanya kepada kelompok pemegang saham dan kreditur saja, melainkan kepada pihak yang lebih luas lagi yaitu masyarakat.

Ja'far dan Arifah (2006) menyatakan bahwa permasalahan lingkungan kini telah menjadi perhatian yang serius oleh para konsumen, investor maupun pemerintah. Investor asing kini cenderung mempersoalkan masalah pengadaan bahan baku dan bagaimana proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan yang terhindar dari permasalahan lingkungan, seperti: kerusakan tanah, rusaknya ekosistem, polusi air, polusi udara dan polusi suara. Lebih lanjut, pemerintah juga mulai memikirkan bagaimana kebijakan ekonomi makronya terkait dengan pengelolaan lingkungan dan konservasi alam.

Di Indonesia, dampak lingkungan operasi pertambangan skala besar seperti PT Freeport Indonesia yang menyebabkan matinya Sungai Aijkwa, Aghawagon dan Otomona, tumpukan batuan limbah tambang (*tailing*) yang jika ditotal mencapai 840.000 ton dan matinya ekosistem di sekitar lokasi pertambangan merupakan fakta kerusakan dan kematian lingkungan yang nilainya tidak akan dapat tergantikan (WALHI, 2011). Kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar lokasi PT Freeport Indonesia juga mencerminkan kondisi pembiaran pelanggaran hukum atas nama kepentingan ekonomi dan desakan politis yang menggambarkan digdayanya kuasa korporasi (WALHI, 2011).

Selain itu, masih banyak kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan seperti di Kabupaten Buton yakni PT Bumi Buton Delta yang mengakibatkan kayu bakau rusak, karang ikut hancur, dan petani rumput laut resah tanpa perhatian dari investor, serta di Kabupaten Konawe Selatan yakni PT

Integra Mining yang mengeruk nikel hingga menghabisi hutan bakau (magrove) (Wibisono, 2011). Pencemaran limbah sawit oleh PT Astra Agro Lestari di Kabupaten Mamuju Utara telah membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih dan mengembangkan lahan pertaniannya (Wibisono, 2011). Lebih lanjut, semburan lumpur panas yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo akibat aktivitas PT Lapindo Brantas. Berdasarkan fakta-fakta di atas jelas terlihat bahwa perusahaan memberikan perhatian yang sangat rendah terhadap dampak lingkungan atas aktivitas kegiatan industri yang dilakukannya.

Perusahaan seharusnya melakukan pertanggungjawaban atas dampak dari semua kegiatan usahanya tidak hanya kepada pemilik modal saja melainkan kepada masyarakat serta lingkungan dan sosial sekitarnya. Pertanggungjawaban sosial perusahaan dapat diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Reporting*. *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainability Reporting* meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA, 2004 dalam Anggraeni, 2006).

Sun *et al.* (2010) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela dalam *annual report* seperti *corporate environmental disclosure* dipandang perlu untuk menunjukkan kepada *stakeholders* akan kesadaran perusahaan dari kepentingan yang lebih luas dan akuntabilitas dengan cara berperilaku tanggung jawab sosial. Di dalam laporan tahunan perusahaan, *corporate environmental disclosure*

biasanya diungkapkan oleh perusahaan di dalam bagian *Safety, Health, and Environment* (SHE).

Dalam hal kebijakan pemerintah terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR), pemerintah membuat peraturan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” (UU PT) dalam Bab V Pasal 74, yang dinyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Diuraikan pula bahwa TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi. Jalal (2007) menyatakan bahwa berbeda dengan kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan yang membutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) terlebih dahulu, sedangkan pembuatan laporan CSR langsung berlaku sejak UU PT disahkan. Jadi, pada akhir 2008 akan banyak sekali laporan CSR yang akan dibuat oleh perusahaan.

Semakin maraknya pembahasan CSR saat ini merupakan hasil dari implementasi praktik *Corporate Governance* (CG) yang prinsipnya menyatakan perlunya perusahaan memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada, etika bisnis dan kesadaran perusahaan atas kepentingan lingkungan dan sosial dimana perusahaan beroperasi demi reputasi dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (OECD, 2004). Di lain pihak, manajer memiliki insentif untuk secara sukarela mengungkapkan informasi tanggung jawab lingkungan perusahaan sebagai sarana untuk menarik minat

investor yang sudah ada dan/atau investor potensial dan untuk meningkatkan citra perusahaan terutama ketika mereka mencoba untuk terlibat dalam manajemen laba (Sun *et al.* 2010). Konflik keagenan muncul ketika manajer oportunistik memanipulasi laba yang menguntungkan mereka sendiri, sehingga *corporate environmental disclosure* digunakan sebagai salah satu cara untuk mengalihkan perhatian pemegang saham dari pemantauan kegiatan manajemen laba (Sun *et al.* 2010).

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan hubungan antara satu atau lebih orang (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal berupa pendelegasian kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. Di dalam hubungan keagenan tersebut, muncul yang dinamakan *agency cost* yang yang dibagi menjadi biaya pengawasan (*monitoring cost*), biaya bonding (*bonding costs*), dan biaya kerugian residual (*residual loss*).

Baru-baru ini, studi empiris yang dilakukan oleh Chih *et al.* (2008) dan Prior *et al.* (2008) telah berusaha mengidentifikasi hubungan antara CSR dan manajemen laba. Menurut Chih *et al.* (2008, dalam Sun *et al.*, 2010), prinsip-prinsip pelaporan CSR harus menyediakan transparansi keuangan dan akuntabilitas untuk semua tingkat *stakeholders*, asalkan manajemen laba terdeteksi dalam praktik CSR. Kemudian Chih *et al.* (2008, dalam Sun *et al.*, 2010) menemukan adanya hubungan negatif antara manajemen laba dengan CSR, ketika manajemen laba diprosikan dengan perataan laba (*income smoothing*).

Penelitian yang dilakukan Prior *et al.* (2008) menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh positif dari praktik manajemen laba (*earnings management*) terhadap CSR. Menurut Prior *et al.* (2008) CSR dipandang sebagai suatu alat yang dapat digunakan manajer untuk mendapatkan dukungan dari kelompok *stakeholders* lainnya karena terlibat dalam praktik manajemen laba.

Selanjutnya penelitian mengenai hubungan *corporate governance* terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) banyak dilakukan di berbagai negara. Khan (2010) menemukan bahwa faktor direksi non-eksekutif dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Bangladesh. Said *et al.* (2009) menemukan bahwa faktor kepemilikan oleh pemerintah dan Komite Audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Malaysia. Namun Waryanto (2010) tidak menemukan adanya pengaruh Komite Audit terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia.

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sun, Salama, Hussainey dan Habbash (2010) dan Handajani, Sutrisno dan Chandrarin (2009). Penelitian yang dilakukan oleh Sun *et al.* (2010) di Inggris pada perusahaan yang terdaftar di *Financial Times and the London Stock Exchange* (FTSE) antara tahun 2006-2007 yang meneliti hubungan antara manajemen laba dengan *corporate environmental disclosure* dan dampak mekanisme *corporate governance* terhadap hubungan tersebut. Menurut Sun *et al.* (2010) tidak ada hubungan signifikan antara manajemen laba dengan *corporate environmental disclosure*. Tetapi untuk variabel jumlah rapat Komite Audit

berpengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dengan *corporate environmental disclosure*.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sun *et al.* (2010), dimana variabel ukuran Dewan Direksi (*board size*) diganti dengan variabel Dewan Komisaris karena disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang menerapkan sistem dua tingkat atau *two tier board system*, yang memisahkan fungsi eksekutif (Direksi) dan fungsi pengawasan (Dewan Komisaris). Variabel Dewan Komsaris dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *proxy* variabel proporsi Komisaris Independen dan jumlah rapat Dewan Komisaris. Selain itu ditambahkan juga variabel lainnya yaitu variabel ukuran Komite Audit. Penggantian mekanisme *corporate governance* dari variabel moderating menjadi variabel independen berdasarkan pada penelitian Handajani dkk. (2009) yang menguji tentang pengaruh manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Handajani dkk. (2009) berhasil menemukan dampak yang signifikan pada faktor manajemen laba, Komite Audit, profil perusahaan, dan jenis industri terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini diberi judul **“ANALISIS PENGARUH PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP *CORPORATE ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI dan PROPER Tahun 2008-2010)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Taka (2002, dalam Kurihama, 2005), pada dasarnya tindakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dibagi menjadi dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif adalah sesuatu yang positif mempengaruhi masyarakat dan termasuk kontribusi sosial, kegiatan sukarela, filantropi dan lain-lain yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan bukan hanya semata-mata untuk patuh kepada hukum dan peraturan saja. Dengan memaksimalkan aspek positif pada CSR ini, maka mampu meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. Di sisi lain, aspek negatif adalah sesuatu yang negatif mempengaruhi masyarakat dan termasuk di dalamnya penipuan, pelanggaran hukum dan peraturan, dan penyimpangan dari norma-norma sosial. Dengan mengendalikan aspek negatif pada CSR ini, maka dapat mencegah kejahatan dan skandal perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan untuk mengendalikan aspek negatif dari CSR. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan dengan proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris dan ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Corporate Environmental Disclosure* (CED)?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap *Corporate Environmental Disclosure* (CED)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang:

1. Pengaruh praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang diproksikan dengan proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris dan ukuran Komite Audit terhadap *Corporate Environmental Disclosure* (CED).
2. Pengaruh manajemen laba terhadap *Corporate Environmental Disclosure* (CED).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, dapat dijadikan tambahan pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen laba terhadap *Corporate Environmental Disclosure* (CED).
2. Bagi para pelaku bisnis, dapat memahami peranan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam kegiatan *Corporate Environmental Disclosure* (CED).
3. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri atas variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri atas simpulan dari penelitian yang dilakukan yang telah menjawab seluruh pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian ini, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi mampu menjelaskan hubungan kerja antara pihak pemberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak penerima wewenang (agen) yaitu manajer. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa dalam hubungan keagenan terdapat adanya konflik kepentingan anatara prinsipal dan agen. Konflik kepentingan tersebut terjadi karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga muncul adanya biaya keagenan (*agency cost*). Lebih lanjut, Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya keagenan (*agency cost*) ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. *The monitoring expenditure by the principal.*

Biaya ini merupakan biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku agen.

2. *The bonding cost.*

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan prinsipal.

3. *The residual loss.*

Biaya ini merupakan pengorbanan nilai uang yang ekuivalen karena penurunan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan kontrak yang tinggi cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, dan perusahaan yang menghadapi visibilitas politis yang tinggi cenderung akan memilih metode dan teknik akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah (Anggraini, 2006).

Benardi, dkk. (2009) menyatakan bahwa di dalam hubungan keagenan, agen diwajibkan untuk memberikan laporan periodik atas kinerjanya kepada prinsipal dan prinsipal akan menilai kinerja agennya tersebut berdasarkan laporan keuangan yang disampaikannya. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat dijadikan sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas atas kinerja perusahaan (agen) kepada prinsipal.

Lebih lanjut, perusahaan dapat melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun *image* pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial. Jadi pengungkapan informasi sosial

berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan (Belkaoui & Karpik, 1989 dalam Anggraini, 2006).

Good Corporate Governance (GCG) sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan (Waryanto, 2010). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam suatu perusahaan.

2.1.3 Teori Sinyal

Pengungkapan informasi keuangan dapat memberikan sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*) perusahaan kepada para pengguna informasi keuangan perusahaan tersebut. Teori sinyal dapat menjelaskan bahwa pemberian sinyal yang dilakukan oleh manajer untuk mengurangi adanya asimetri informasi. Manajer dapat memberikan informasi atas kinerja yang dilakukannya melalui laporan keuangan dengan menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang dapat menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate* (Watts, 2003 dalam Jama'an, 2008).

Menurut Jama'an (2008), teori sinyal mampu mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara perusahaan (agen), pemilik (prinsipal) dan pihak luar

dengan cara menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dan mempunyai integritas yang dapat diandalkan. Cara untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan oleh perusahaan (agen), maka perlu adanya opini atau pendapat dari pihak lain yang independen tentang informasi laporan keuangan tersebut.

Sun *et al.* (2010) menyatakan bahwa manajer sebagai agen memiliki insentif untuk secara sukarela mengungkapkan informasi tanggung jawab lingkungan perusahaan (*corporate environmental disclosure*) sebagai sinyal agar dapat menarik investor yang sudah ada dan/atau investor potensial untuk dapat meningkatkan *image* perusahaan, terutama ketika mereka mencoba terlibat dalam manajemen laba. Lebih lanjut menurut Sun *et al.* (2010), *corporate environmental disclosure* (CED) merupakan sinyal kepada investor dan *stakeholders* lainnya bahwa perusahaan secara aktif ikut serta dalam praktik-praktik CSR dan hal tersebut menunjukkan bahwa nilai perusahaan di pasar dalam posisi yang baik. Kinerja sosial perusahaan yang baik dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan keandalan reputasi di pasar modal dan utang. Sedangkan dari sudut pandang manajer, CED dapat digunakan sebagai sinyal untuk mengalihkan perhatian pemegang saham dari masalah di mana manajer mungkin dihukum jika terdeteksi adanya tindakan manipulasi laba. Jadi, teori sinyal disini mampu menjelaskan hubungan *corporate environmental disclosure* sebagai salah satu tindakan CSR perusahaan di bidang lingkungan terhadap kegiatan manajemen laba.

2.1.3 Teori Stakeholder

Stakeholder theory menjelaskan hubungan antara *stakeholders* dengan informasi yang mereka terima. Manajer dapat dipekerjakan tidak hanya sebagai agen pemilik, tetapi juga sebagai agen dari *stakeholders* lain (Hill dan Jones, 1992 dalam Sun *et al.* 2010). Manajer dapat melakukan tindakan manajemen laba dalam upayanya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan *stakeholders* lainnya. Meskipun demikian, para *stakeholders* akan menanggapi tindakan manajemen yang merugikan akibat praktik manajemen laba tersebut. Dengan demikian, manajer mungkin memiliki dorongan untuk mengontrol tindakan mereka dengan membuat laporan keuangan yang lebih informatif dan luas, sehingga dapat meminimalkan ancaman untuk dipecat (Sun *et al.* 2010).

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), *stakeholder theory* menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy dan Adams (1994, p.53) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa:

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin *powerful stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Deegan (2000, dalam Ghozali dan Chariri, 2007) mengatakan *stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang mereka miliki atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Lebih lanjut Ullmann (1985) mengatakan bahwa organisasi akan memilih *stakeholder* yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat menghasilkan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.

Berdasarkan argumen-argumen diatas, tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer perusahaan mengerti akan lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di dalam lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* ini adalah untuk menolong manajer perusahaan dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka, dan meminimalkan kerugian bagi *stakeholder*. Pada kenyataannya, inti keseluruhan dari teori *stakeholder* terletak pada apa yang akan terjadi ketika perusahaan dan *stakeholder* menjalankan hubungan mereka (Kiswanto, 2011).

2.1.4 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyebutkan bahwa organisasi secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatannya sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana organisasi tersebut berada. Norma masyarakat selalu berubah seiring dengan perubahan waktu sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya. Proses untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan kontrak sosial yang dibuat oleh perusahaan dengan berbagai pihak dalam masyarakat (Harsanti, 2011).

Dowling dan Pfeffer (1975, dalam Chariri dan Ghozali, 2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Mereka mengatakan (p. 131):

Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan/organisasi terhadap masyarakat sekitar. Namun di dalam interaksi antara perusahaan terhadap masyarakat tersebut bisa terjadi perbedaan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat yang dinamakan dengan "*legitimacy gap*". Menurut Warticl dan Mahon (1994, dalam Chariri dan Ghozali, 2007), *legitimacy gap* dapat terjadi karena tiga alasan:

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.

2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah.
3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Lindblom (dalam Harsanti, 2011) mengatakan bahwa terdapat empat strategi legitimasi yang dapat diadopsi oleh suatu organisasi ketika dihadapkan dengan *legitimacy gap*. Dalam hal ini suatu organisasi dapat:

1. Mengubah outputnya dan metode atau tujuan organisasi agar sesuai dengan harapan masyarakat yang relevan dan kemudian menginformasikannya kepada kelompok masyarakat tersebut.
2. Tidak mengubah output, metode ataupun tujuan organisasi, tetapi mendemonstrasikan kesesuaian dari output, metode, dan tujuan melalui pendidikan dan informasi.
3. Mencoba untuk mengubah persepsi dari masyarakat dengan menghubungkan organisasi dengan simbol-simbol yang memiliki status legitimasi yang tinggi dan
4. Mencoba untuk mengubah harapan masyarakat dengan menyesuaikannya dengan output, tujuan dan metode organisasi.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar dan selanjutnya akan mengamankan perusahaan dari hal-hal

yang tidak diinginkan. Lebih jauh lagi, legitimasi ini akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut (Harsanti, 2011).

2.1.5 *Corporate Social Responsibility*

Eksternalitas muncul ketika perusahaan terlibat dalam kegiatan yang memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Jika dampaknya buruk, hal ini disebut eksternalitas negatif; jika dampaknya baik, disebut eksternalitas positif (Mankiw, 2011). Salah satu solusi untuk mengatasi masalah eksternalitas ini yaitu dengan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan untuk masyarakat sekitar. Di Indonesia, dalam hal kebijakan pemerintah terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR), pemerintah membuat peraturan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” dalam Bab V Pasal 74, yang dinyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Diuraikan pula bahwa TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan, dan pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dikenai sanksi.

Menurut Hackston dan Milne (1996, dalam Sembiring, 2005), *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut, *World Bank* (Bank Dunia) mendefinisikan CSR sebagai:

Corporate Social Responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development.

Definisi di atas menyebutkan CSR adalah suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperkerjakan karyawan, keluarga mereka, komunitas sekitar dan masyarakat yang lebih luas untuk memperbaiki kualitas hidup, dengan cara melakukan bisnis dan pengembangan yang baik.

Harsanti (2011) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi berpijak pada prinsip *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan hanya direfleksikan pada kondisi keuangannya saja dan perusahaan hanya mempunyai kewajiban ekonomi kepada pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Jadi CSR dapat menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan dan keuangan.

2.1.6 Corporate Environmental Disclosure

Menurut Wilmshurst dan Frost (2000, dalam Fatayaningrum, 2011), *environmental disclosure* adalah pengungkapan perusahaan terhadap dampak dari aktivitas perusahaan pada lingkungan fisik atau alam, di mana perusahaan tersebut beroperasi. Lebih lanjut menurut Suratno dkk. (2006), *environmental disclosure* merupakan pengungkapan informasi terkait dengan lingkungan di dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan. Untuk pengukuran *environmental disclosure*

dapat dilihat pada pengungkapan CSR di laporan tahunan perusahaan maupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara terpisah.

Sebagian perusahaan dalam industri modern menyadari sepenuhnya bahwa isu lingkungan dan sosial juga merupakan bagian penting dari perusahaan disamping usahanya untuk mencari laba (Pflieger, *et al.*, 2005 dalam Ja'far dan Arifah, 2006). Menurut Ferreira (2004, dalam Ja'far dan Arifah, 2006), persoalan konservasi lingkungan merupakan tugas dari setiap individu, perusahaan dan pemerintah. Sebagai bagian dari tatanan sosial, perusahaan seharusnya melaporkan pengelolaan lingkungan perusahaannya di dalam *annual report*. Hal ini karena terkait dengan tiga aspek persoalan kepentingan yaitu keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan dan kinerja sosial.

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia menggunakan standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). Dalam penelitian ini digunakan standar GRI untuk mengukur *corporate environmental disclosure* (CED). *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah organisasi nirlaba yang memelopori kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial berkelanjutan. GRI menyediakan untuk semua perusahaan dengan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif yang digunakan di seluruh dunia (www.globalreporting.org).

Daftar pengungkapan sosial yang berdasarkan standar GRI juga digunakan di dalam penelitian Handajani dkk. (2009), penelitiannya menggunakan 6 indikator pengungkapan, yaitu: ekonomi (9 item), lingkungan (30), tenaga kerja

(14), hak asasi manusia (9 item), masyarakat (8 item) dan produk (9 item). Berdasarkan bidang lingkungan (*environment*), indikator yang digunakan untuk penelitian ini hanyalah satu kategori, yaitu indikator kinerja lingkungan (30 item).

Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2002 telah meluncurkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) sebagai pengembangan dari PROPER PROKASIH. Tujuan dari penerapan instrumen PROPER ini untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Peningkatan kinerja penataan dapat terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat adanya pengumuman peringkat kinerja PROPER kepada publik dan selanjutnya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berperingkat baik dan memberikan tekanan dan/atau dorongan kepada perusahaan yang belum berperingkat baik (Laporan PROPER, 2010).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.18 Tahun 2010 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemberian peringkat warna digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan. Kinerja pengelolaan lingkungan oleh perusahaan terbaik akan diberikan peringkat emas, hijau, selanjutnya biru dan kinerja pengelolaan lingkungan oleh perusahaan terburuk akan diberikan peringkat hitam. Untuk lebih jelasnya, kriteria peringkat PROPER disajikan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Kriteria Peringkat PROPER

| PERINGKAT WARNA | DEFINISI |
|------------------------|---|
| EMAS | untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. |
| HIJAU | untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (<i>Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i>), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik. |
| BIRU | untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| MERAH | upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi |
| HITAM | untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi |

Sumber : Laporan Hasil Penilaian PROPER 2010.

2.1.7 Manajemen Laba

Scott (2006) mendefinisikan manajemen laba sebagai “*the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*”. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa manajemen laba adalah suatu pilihan keputusan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai

beberapa tujuan tertentu. Lebih lanjut, menurut Setyawati dan Na'im (2000, dalam Isnugrahadhi dan Kusuma, 2010), mendefinisikan manajemen laba sebagai usaha campur tangan yang dilakukan oleh manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen laba akan mengurangi kredibilitas suatu laporan keuangan sebagai sarana untuk komunikasi antara manajer dengan pihak eksternal perusahaan.

Scott (2006) membagi manajemen laba menjadi dua sudut pandang yang berbeda yaitu sudut pandang positif "*good side*" dan sudut pandang negatif "*bad side*". Dalam penelitian ini manajemen laba dilihat dari sudut pandang negatif "*bad side*" sebagai *opportunistic earnings management* yaitu dari perspektif kontrak, manajemen laba dapat digunakan sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan bonus mereka. Selanjutnya, manajemen laba digunakan ketika manajer bermaksud untuk menerbitkan modal saham baru dan ingin memaksimalkan dana hasil penerbitan saham baru tersebut (Scott, 2006).

Untuk mendeteksi ada tidaknya manajemen laba di dalam perusahaan, maka pengukuran atas akrual adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Total akrual merupakan selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) *normal accruals* atau *non discretionary accruals* adalah bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan dan (2) *abnormal accruals* atau *discretionary accruals* adalah bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi (Utami, 2005).

2.1.8 Praktik *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006), *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk penerapan GCG sendiri perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa. Oleh karena itu, penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia diharapkan mampu untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2002) mendefinisikan *corporate governance* dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee*, yaitu: "seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan". Lebih lanjut, FCGI (2002) menyatakan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah "untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)". Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas-asas GCG diterapkan di setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan (KNKG, 2006). Adapun asas-asas GCG yang disusun oleh

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) di dalam *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* tahun 2006, yaitu (KNKG, 2006):

1. Transparansi (*Transparency*)

“Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya”.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

“Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan”.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

“Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*”.

4. Independensi (*Independency*)

“Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain”.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

“Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan”.

Organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif di dalam perusahaan. Organ perusahaan tersebut harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan (KNKG, 2006).

2.1.8.1 Dewan Komisaris

KNKG (2006) mendefinisikan bahwa Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam mengambil keputusan operasional perusahaan dan kedudukan masing-masing anggota Dewan

Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Sedangkan Komisaris Utama bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris (*primus inter pares*).

Menurut FCGI (2002), berkenaan dengan bentuk Dewan di dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda pula, yaitu:

1. Sistem Hukum Anglo Saxon mempunyai Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*. Sistem ini hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dengan Direktur Independen yang berprinsip kerja paruh waktu (Non Direktur Eksekutif). Negara-negara yang menerapkan *One Tier System* ini misalnya Amerika Serikat dan Inggris. Untuk dapat melihat lebih jelasnya bagaimana struktur *Board of Directors* (BoD) dalam *One Tier System*, dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:

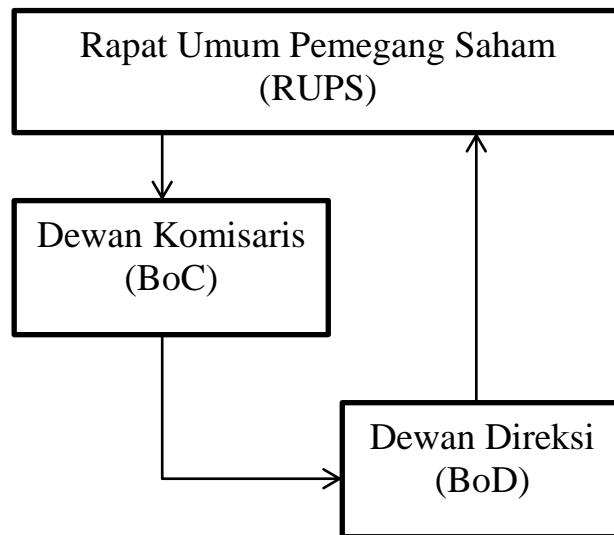
Gambar 2.1
Struktur *Board of Director* (BoD) dalam *One Tier System*



Sumber: FCGI (2002)

2. Sistem Hukum Kontinental Eropa mempunyai Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*. Sistem ini mempunyai dua badan terpisah di dalam sebuah perusahaan, yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan Direksi bertugas untuk mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahannya dan pengawasan oleh Dewan Komisaris. Dalam sistem ini, Dewan Komisaris tidak boleh ikut campur dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam melakukan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota Direksi diangkat dan sewaktu-waktu dapat diganti oleh Dewan Komisaris sedangkan anggota Dewan Komisaris diangkat dan diganti berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Negara-negara yang menerapkan *Two Tiers System* adalah Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang. Karena sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda, maka hukum perusahaan di Indonesia menerapkan *Two Tiers System*. Untuk dapat melihat bagaimana struktur BoD dan BoC dalam *Two Tiers System* yang berkembang di Indonesia, dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini:

Gambar 2.2
Struktur BoD dan BoC dalam *Two Tiers System* yang berkembang di Indonesia



Sumber: FCGI (2002)

Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut ini (KNKG, 2006):

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, cepat, dan dapat bertindak independen.
2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu memiliki integritas dan kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai dengan pemberhentian sementara.

2.1.8.2 Komite Audit

Komite Audit adalah suatu komite yang berfungsi memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (*Egon Zehnder International*, dalam FCGI, 2002). Anggota Komite Audit perlu mempunyai suatu pedoman tentang tanggung jawab dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk *Audit Committee Charter*. *Audit Committee Charter* adalah suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta struktur Komite Audit yang dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Dewan Komisaris yang dapat menjamin terciptanya kondisi pengawasan suatu perusahaan dengan baik (FCGI, 2002).

Menurut FCGI (2002), pada umumnya Komite Audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang perusahaan.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, etika bisnis serta

melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*)

Tanggung jawab dalam pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

Lebih lanjut, KNKG (2006) menyatakan bahwa di dalam pedoman GCG di Indonesia dijelaskan bahwa Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Sedangkan untuk jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas suatu perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Dan salah seorang anggota harus memiliki latar belakang serta kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan (KNKG, 2006).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Prior *et al.* (2008) yang meneliti hubungan antara *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Corporate Financial Performance* (CFP) dan manajemen laba. Variabel yang digunakan adalah manajemen laba dan CFP sebagai variabel independen dan CSR sebagai variabel independen dengan variabel kontrol, yaitu investasi *Research and Development* (R&D), konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, tingkat risiko manajerial, ukuran perusahaan, *leverage*, dan sumber daya keuangan. Sampel yang digunakan adalah 593 perusahaan dari 26 negara yang diambil dari *database Sustainable Investment Research International Company* (SIRI) dari tahun 2002 hingga 2004. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi manajemen laba dan kegiatan CSR adalah kegiatan yang mahal bagi perusahaan dan dibenarkan bahwa praktik manajemen laba memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan. Dengan kata lain, Prior *et al.* (2008) menemukan bahwa hubungan antara CSR dan kinerja keuangan diperlemah dengan adanya praktik manajemen laba.

Said *et al.* (2009) meneliti hubungan antara CSR dan karakteristik *corporate governance* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Malaysia. Karakteristik *corporate governance* yang digunakan yaitu *board size*, *independent non-executive director*, *CEO duality*, *audit committee*, *ownership concentration*, *managerial ownership*, *foreign ownership*, dan *government shareholding*. Sampel yang digunakan sebanyak 150 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Malaysia tahun 2006. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kepemilikan

saham pemerintah (*government shareholding*) dan Komite Audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Malaysia.

Handajani dkk. (2009) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh manajemen laba dan mekanisme *Corporate Governance* (CG) dengan CSR *disclosure*. Sampel yang digunakan adalah 67 perusahaan publik yang terdaftar di BEI dengan periode dari tahun 2005 hingga 2007. Kemudian menggunakan variabel manajemen laba dan mekanisme CG yang diproksikan dengan komposisi Dewan Komisaris Independen, kepemilikan institusional, dan Komite Audit sebagai variabel independen. Menemukan hasil bahwa manajemen laba, Komite Audit, profil perusahaan, dan jenis industri berpengaruh signifikan terhadap CSR *disclosure*.

Penelitian yang dilakukan Sun *et al.* (2010), telah meneliti hubungan antara CED dan manajemen laba dan dampak mekanisme CG terhadap asosiasi tersebut. Mekanisme CG yang digunakan adalah ukuran Dewan Direksi, jumlah rapat Komite Audit dengan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan jenis industri. Menggunakan sampel 245 perusahaan non-keuangan Inggris untuk tahun yang berakhir pada Maret 2007. Sun *et al.*, (2010) tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara CED dan manajemen laba. Kemudian juga menemukan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki hubungan signifikan antara CED dan manajemen laba, tetapi tidak untuk ukuran Dewan Direksi.

Terzaghi (2012) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh *earning management* dan mekanisme *Corporate Governance* (CG) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sampel yang digunakan adalah 89 perusahaan publik yang terdaftar di BEI tahun 2008. Kemudian menggunakan variabel manajemen laba dan mekanisme CG yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran Dewan Komisaris, komposisi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Variabel kontrol yang digunakan adalah profil perusahaan. Hasil penelitian menemukan bahwa ukuran Dewan Komisaris dan profil perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti (Tahun) | Variabel | Alat Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|----------------------------|---|---|---|
| 1. | Prior <i>et al.</i> (2008) | <ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): manajemen laba dan CFP • Dependen (Y): CSR • Kontrol (X): investasi R&D, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, tingkat risiko, ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, sumber daya keuangan atau <i>financial resources</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Regression with robustness checks | Perusahaan dengan aktivitas CSR yang tinggi sangat mungkin terlibat dalam praktik manajemen laba. |

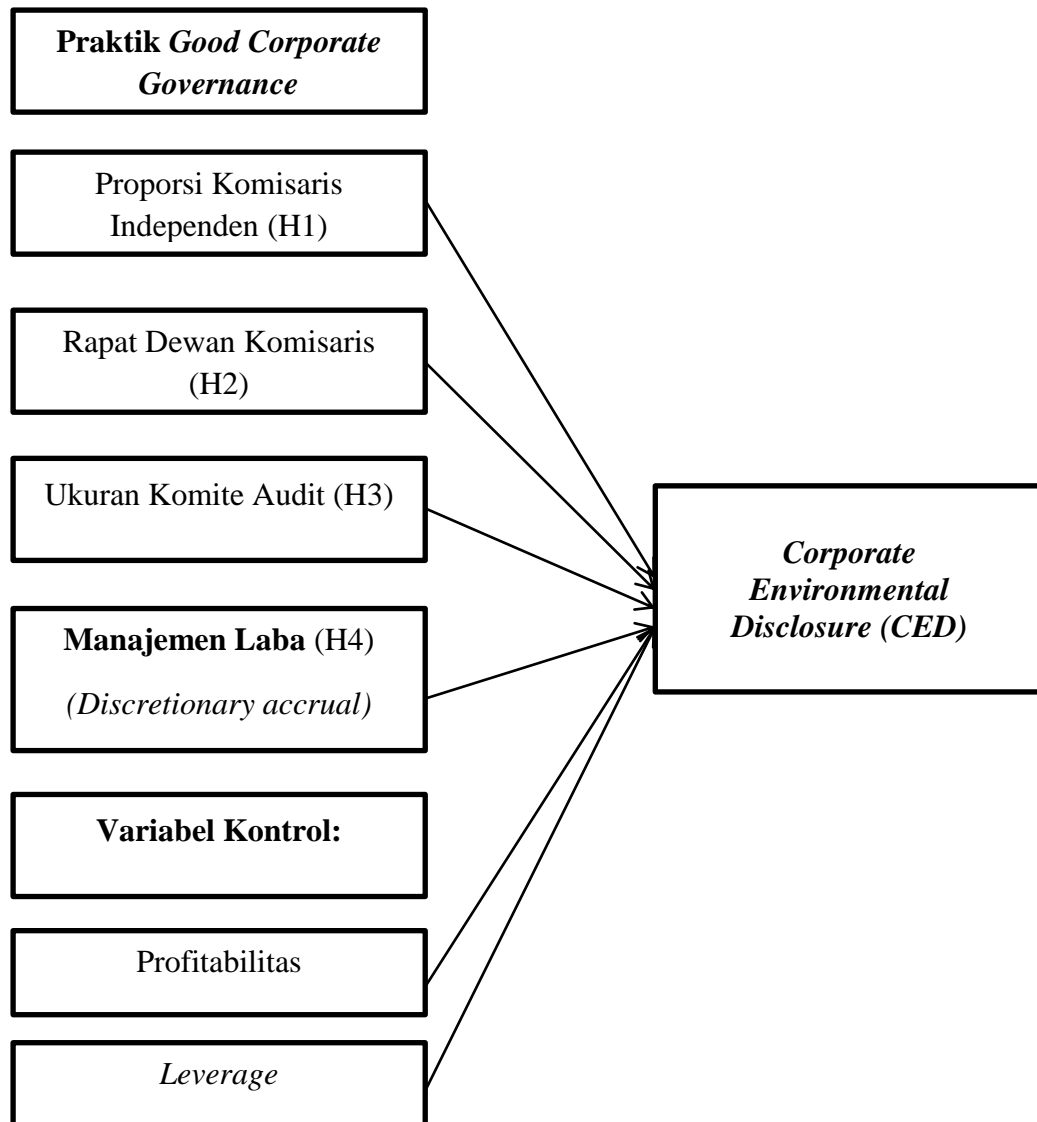
| | | | | |
|----|---------------------------|---|---|--|
| 2. | Said <i>et al.</i> (2009) | <ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): <i>board size, independen non-executive director, CEO duality, audit committee, ownership concentration, managerial ownership, foreign ownership</i>, dan <i>government shareholding</i> • Dependen (Y): <i>CSR disclosure</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Regression Analysis (normality, linearity, homoscedasticity, dan multicollinearity) | Kepemilikan saham pemerintah (<i>government shareholding</i>) dan komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Malaysia. |
| 3. | Handajani dkk. (2009) | <ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): manajemen laba, mekanisme CG (komposisi dewan direksi independen, kepemilikan institusional, komite audit) • Dependen (Y): <i>CSR disclosure</i> • Kontrol (X): profil perusahaan, jenis industri, leverage | <ul style="list-style-type: none"> • Multiple linear regression analysis | Menemukan bahwa manajemen laba, komite audit, profil perusahaan, jenis industri berpengaruh signifikan terhadap <i>CSR disclosure</i> . |
| 4. | Sun <i>et al.</i> (2010) | <ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): manajemen laba • Dependen (Y): CED • Moderating: CG (ukuran dewan direksi, jumlah rapat komite audit) • Kontrol (X): ukuran | <ul style="list-style-type: none"> • Ordinary Least Square (OLS) regression with robust standard errors | Tidak menemukan adanya hubungan signifikan antara CED dan manajemen laba. Kemudian menemukan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki hubungan signifikan antara CED dan manajemen laba. |

| | | | | |
|----|-----------------|--|---------------------------|--|
| | | perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas, jenis industri | | Akan tetapi tidak ditemukan pada ukuran dewan direksi. |
| 5. | Terzaghi (2012) | <ul style="list-style-type: none"> • Independen (X): <i>earning management</i> dan mekanisme CG • Dependen (Y): pengungkapan CSR • Kontrol (X): profil perusahaan | • Regresi berganda linier | Menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dan profil perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. |

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, di dalam penelitian ini menggunakan modifikasi antara penelitian yang dilakukan oleh Sun *et al.* (2010) dan Handajani dkk. (2009). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba dan praktik *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris dan ukuran Komite Audit sebagai variabel independen. *Corporate Environmental Disclosure* (CED) sebagai variabel dependen serta penggunaan variabel kontrol yaitu profitabilitas dan *leverage*. Berikut ini adalah kerangka konseptual berdasarkan model penelitian ini yang dapat digambarkan dalam bentuk kerangka skematik sebagai berikut:

Gambar 2.3
Model Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Praktik *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

Dalam upaya untuk mewujudkan praktik *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terdapat dua aspek keseimbangan, yaitu

keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dapat dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal, dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dapat dilakukan dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank, dan organisasi lainnya yang berkepentingan (Sabeni, 2005).

Corporate Environmental Disclosure merupakan salah satu tindakan CSR sebagai fokus dari *corporate governance* akan menjadi alat untuk menggabungkan perhatian sosial dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang tidak hanya akan bermanfaat bagi investor tetapi juga pelanggan dan masyarakat (Gill, 2008 dalam Handajani dkk. 2009). Praktik *Good Corporate Governance* dapat diproksikan dengan proporsi Komisaris Independen, jumlah rapat Dewan Komisaris dan ukuran Komite Audit.

2.4.1.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris (FCGI, 2002).

Webb (2004, dalam Said *et al.*, 2009) menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh gelar “*socially responsible*” memiliki lebih banyak anggota Komisaris Independen apabila dibandingkan dengan perusahaan yang “*non-socially responsible*”. Penelitian oleh Webb ini juga menunjukkan bahwa Komisaris Independen memainkan peran penting dalam meningkatkan *image* perusahaan serta berperan dalam hal *monitoring* guna memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan sepatutnya oleh manajemen.

Komisaris Independen diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006). Dengan demikian, semakin besar proporsi Komisaris Independen yang dimiliki perusahaan diharapkan kinerja Dewan Komisaris mampu bertindak semakin objektif dan mampu melindungi kepentingan perusahaan dalam hal ini mendorong peningkatan *Corporate Environmental Disclosure* (CED) sebagai salah satu proksi dari kegiatan CSR perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

2.4.1.2 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

Egon Zehnder International (dalam FCGI, 2002) menyatakan bahwa Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance*, yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam

mengelola perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Di Indonesia, menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab VII Pasal 108 dinyatakan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Untuk mendukung terlaksananya tugas Dewan Komisaris secara maksimal, Dewan Komisaris akan mengadakan pertemuan atau rapat yang disebut dengan rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan bersama tentang kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. Proses rapat Dewan Komisaris (*board process*) yang baik harus diakhiri dengan membacakan kesimpulan dan keputusan rapat. Hal ini digunakan untuk menghindari ketidakjelasan mengenai kesimpulan dan keputusan rapat bagi semua anggota rapat, dan dapat dijadikan sebagai dokumen formal untuk mengambil langkah-langkah yang disetujui dalam rapat (Muntoro, 2006).

Penelitian Xie *et al.* (2003) menemukan bahwa rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat akrual kelolaan di dalam perusahaan. Hal ini berarti semakin sering frekuensi Dewan Komisaris mengadakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen semakin efektif. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin efektifnya fungsi pengawasan, maka *corporate environmental disclosure* sebagai salah satu proksi dari CSR oleh perusahaan

akan semakin luas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

2.4.1.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

Komite Audit adalah suatu komite yang berfungsi memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (*Egon Zehnder International*, 2000 dalam FCGI, 2002). Lebih lanjut, FCGI (2002) menyatakan bahwa Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan manajemen dalam melakukan tugas operasional perusahaan, dan harus memiliki pengalaman dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Hal ini dikarenakan untuk menjaga integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. Sedangkan jumlah anggota Komite Audit disesuaikan dengan besar-kecilnya organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal.

Focker (1992, dalam Said *et al.*, 2009) menyebutkan bahwa Komite Audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

2.4.2 Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

Scott (2006) mendefinisikan manajemen laba sebagai “*the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*”. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa manajemen laba adalah suatu pilihan keputusan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Lebih lanjut, Healy and Wahlen (1999, dalam Sun *et al.*, 2010) berpendapat bahwa tindakan manajemen laba terjadi ketika salah satu manajer menyesatkan beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.

Konflik keagenan muncul ketika manajer oportunistik memanipulasi laba yang menguntungkan mereka sendiri, sehingga *corporate environmental disclosure* (CED) dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengalihkan perhatian pemegang saham dari pemantauan kegiatan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer (Sun *et al.* 2010). Sejalan dengan argumen-argumen tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin besar manajer melakukan tindakan manajemen laba maka semakin luas *corporate environmental disclosure* sebagai salah satu proksi dari tindakan CSR perusahaan. Jadi, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel-variabel dalam penelitian ini adalah

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

| VARIABEL | DIMENSI | INDIKATOR | SKALA PENGUKURAN |
|------------|---|---|------------------|
| Dependen | <i>Corporate Environmental Disclosure</i> | Presentase pengungkapan kinerja lingkungan perusahaan | Skala Rasio |
| Independen | Proporsi Komisaris Independen | Presentase Komisaris Independen | Skala Rasio |
| | Jumlah Rapat Dewan Komisaris | Jumlah rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun/Jumlah maksimal rapat Dewan Komisaris perusahaan sampel | Skala Interval |
| | Ukuran Komite Audit | Jumlah anggota Komite Audit dalam perusahaan/Jumlah maksimal anggota Komite Audit perusahaan sampel | Skala Interval |
| | Manajemen Laba | <i>Discretionary accrual</i> | Skala Rasio |
| Kontrol | Profitabilitas | ROA | Skala Rasio |
| | <i>Leverage</i> | DER | Skala Rasio |

3.1.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen merupakan variabel terikat dan dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel terikat pada penelitian ini adalah *Corporate Environmental Disclosure* (CED). Menurut Suratno dkk. (2006) *environmental disclosure* merupakan pengungkapan informasi terkait lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan. Untuk pengukuran *environmental disclosure* dapat dilihat pada pengungkapan CSR di laporan tahunan perusahaan maupun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara terpisah.

Penilaian CSR menggunakan pedoman indeks GRI yang berlaku secara internasional yang telah digunakan di banyak negara. Jumlah item CSR pengungkapan menurut GRI adalah 79 yang terdiri dari: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja (14 item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (9 item). Untuk penelitian ini indikator yang digunakan hanyalah indikator kinerja lingkungan (30 item). Kinerja lingkungan mencakup kinerja yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi yang berkaitan lainnya seperti limbah lingkungan dan dampak dari produk dan jasa (www.globalreporting.org). Secara rinci, kategori pengungkapan kinerja lingkungan yang sesuai dengan pedoman GRI dapat dilihat pada lampiran B.

Pengukuran *corporate environmental disclosure* dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CED} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item pengungkapan lingkungan GRI}}$$

3.1.2 Variabel Bebas (Independen)

Variabel independen merupakan variabel bebas yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen laba.

3.1.2.1 Praktik *Good Corporate Governance*

Praktik *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini diproksikan oleh:

3.1.2.1.1 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen untuk kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Dalam penelitian ini Proporsi Komisaris Independen diukur dengan rasio atau prosentase (%) antara jumlah anggota Komisaris Independen dibandingkan dengan total anggota Dewan Komisaris di perusahaan.

3.1.2.1.2 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah Rapat Dewan Komisaris merupakan jumlah rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam waktu satu tahun. Dalam penelitian ini jumlah rapat Dewan Komisaris diukur menggunakan skala interval yaitu dengan menghitung jumlah rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun pada laporan tahunan perusahaan dibagi dengan jumlah maksimal rapat Dewan Komisaris perusahaan sampel.

3.1.2.1.3 Ukuran Komite Audit

Ukuran Komite Audit merupakan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran Komite Audit diukur menggunakan skala interval yaitu dengan menghitung jumlah anggota Komite Audit dalam laporan tahunan perusahaan dibagi dengan jumlah maksimal anggota Komite Audit perusahaan sampel.

3.1.2.2 Manajemen Laba

Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan *proxy discretionary accruals* (DA) dimana menggunakan *The Modified Jones Model* (Dechow *et al.*, 1995, dalam Herawaty, 2008). Adapun tahapan penghitungan *discretionary accrual* adalah sebagai berikut:

1. Menghitung total akrual sebagai berikut:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \quad (1)$$

Dimana:

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t.

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t.

CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan i pada periode ke t.

2. Menentukan koefisien dari regresi total akrual.

Akrual diskresioner merupakan perbedaan antara total akrual (TA) dengan *nondiscretionary accrual* (NDA). Langkah pertama untuk menentukan *nondiscretionary accrual* yaitu dengan melakukan regresi sebagai berikut:

$$TA_{it}/A_{it-1} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + e \quad (2)$$

Dimana:

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1

ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

e = *Error*

3. Menentukan *Nondiscretionary accrual*.

Regresi yang dilakukan di persamaan (2) menghasilkan koefisien β_1 , β_2 dan β_3 . Koefisien β_1 , β_2 dan β_3 tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi *nondiscretionary accrual* melalui persamaan (3) berikut ini:

$$NDA_{it} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + e$$

Dimana:

NDA_{it} = *Nondiscretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

ΔREC_{it} = Perubahan piutang perusahaan i pada tahun t

e = Error

4. Menentukan *discretionary accrual*.

Setelah didapatkan akrual nondiskresioner, kemudian *discretionary accrual* bisa dihitung dengan mengurangi total akrual (hasil perhitungan di persamaan (1)) dengan *nondiscretionary accrual* (hasil perhitungan di persamaan (3)).

$$DA_{it} = (TA_{it}/A_{it-1}) - NDA_{it} \quad (4)$$

Dimana:

DA_{it} = *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang digunakan untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya menjadi lebih baik sehingga mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik. Variabel kontrol bukan merupakan variabel utama yang akan diteliti dan diuji tetapi lebih ke variabel lain yang mempunyai efek pengaruh terhadap variabel independen (Susanti dkk. 2010). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas dan *leverage*.

3.1.3.1 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Dalam penelitian ini profitabilitas perusahaan diukur dengan *Return on Asset* (ROA) sebagai mana

telah dilakukan dalam penelitian Benardi, dkk. (2009) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Aset}}$$

3.1.3.2 *Leverage*

Leverage yang dimaksud di dalam penelitian ini merupakan ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya. Hal ini menggambarkan berapa tingkat kelebihan kewenangan yang dimiliki oleh *debtholders* dibandingkan dengan kewenangan *shareholders*. Dalam penelitian ini rasio *leverage* diukur dengan membagi total utang dengan jumlah ekuitas perusahaan seperti dalam penelitian Benardi, dkk. (2009).

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2010, karena perusahaan-perusahaan non keuangan ini lebih banyak mempunyai pengaruh/dampak terhadap lingkungan sekitarnya akibat dari aktivitas operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel sesuai dengan

kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di BEI dan PROPER tahun 2008-2010.
2. Menyediakan laporan tahunan (*annual report*) lengkap selama tahun 2008-2010 dan yang mengalami laba.
3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data kuantitatif berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan publik non keuangan tahun 2008-2010. Sumber data yang digunakan merupakan publikasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan non keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang diperoleh di Pojok BEI Universitas Diponegoro, situs resmi BEI (www.idx.co.id) dan situs web resmi masing-masing perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan yang terpilih menjadi sampel. Sebagai panduan, digunakan

instrumen penelitian berupa *check list* atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang berisi item-item pengungkapan informasi kinerja lingkungan perusahaan.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata, maksimal, minimal, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan masing-masing variabel penelitian.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (*residual*) memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik *normal probability plot* dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample*

K-S). Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik *normal probability plot* adalah (Ghozali, 2011):

1. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2011):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2011).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini diuji dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2011):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi penelitian ini menggunakan metode uji Durbin-Watson (*DW test*). Metode Durbin-Watson menggunakan titik kritis yaitu batas bawah d_l dan batas atas d_u . H_0 diterima jika nilai Durbin-Watson lebih besar dari batas atas nilai Durbin-Watson pada tabel. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas (Ghozali, 2011).

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Analisis regresi berganda adalah alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis regresi berganda ini dipakai karena untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas (metrik) terhadap satu variabel terikat (metrik) dengan *software* SPSS. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang akan diuji adalah sebagai berikut :

$$CEdit = \alpha_0 + \alpha_1 INKOMit + \alpha_2 RAKOMit + \alpha_3 UDITit + \alpha_4 DAit + \alpha_5 ROAit + \alpha_6 LEVit + e$$

Dimana:

| | |
|---------------------|--|
| CEDit | = <i>Corporate environmental disclosure</i> |
| α_0 | = Konstanta |
| $\alpha_1-\alpha_6$ | = Koefisien |
| INKOMit | = Proporsi Dewan Komisaris Independen |
| RAKOMit | = Jumlah Rapat Dewan Komisaris |
| UDITit | = Ukuran (jumlah) Komite Audit |
| DAit | = Manajemen laba diproksi dengan <i>discretionary accrual (DA)</i> . |
| ROAit | = Profitabilitas diproksi dengan <i>Return On Assets</i> |
| LEVit | = Rasio <i>Leverage (Debt to Equity Ratio)</i> |
| e | = <i>Error</i> |

3.5.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen (Ghozali, 2011). Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R^2) ini berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Dari sini diketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

3.5.3.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi (5%), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $f < 0.05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $f > 0.05$, maka H_0 diterima, artinya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan tingkat signifikansi (5%), maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi $t < 0.05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $t > 0.05$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.